



KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PUSAT

NOMOR e-0065 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PENGUKURAN INDEKS KESEJAHTERAAN SOSIAL
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengukuran Indeks Kesejahteraan Sosial di tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat sesuai dengan kebijakan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu dibentuk Tim Pengukuran Indeks Kesejahteraan Sosial Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Pengukuran Indeks Kesejahteraan Sosial Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2026 tentang Indeks Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 490);
6. Surat Edaran Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Pengukuran Indeks Kesejahteraan Sosial Tahun 2026;
7. Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 119 Tahun 2026 tentang Tim Pengukuran Indeks Kesejahteraan Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TENTANG TIM PENGUKURAN INDEKS KESEJAHTERAAN SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT.
- KESATU :** Menetapkan Tim Pengukuran Indeks Kesejahteraan Sosial Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Satu yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA :** Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas pengukuran Indeks Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas/Unit Kerja Perangkat Daerah terkait di Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- KETIGA :** Tim Pengukuran Indeks Kesejahteraan Sosial Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas untuk:
- a. melaksanakan koordinasi lintas Suku Dinas/Unit Kerja di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk mendukung penghasilan data Indeks Kesejahteraan Sosial;
 - b. melakukan pengumpulan bukti dukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Dua di tingkat kota untuk memastikan validitas data; dan
 - c. menyampaikan dan memasukkan data ke dalam sistem informasi melalui sukses.kemensos.go.id .
- KEEMPAT :** Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Oktober 2026

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,


ARIFIN
 NIP 197206221992031003

Tembusan:

1. Wakil Walikota Administrasi Jakarta Pusat
2. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat
3. Para Asisten Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat
4. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat

Lampiran I : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
 Nomor : e-0065 TAHUN 2026
 Tanggal : 12 Oktober 2026

SUSUNAN KEANGGOTAN DAN URAIAN TUGAS TIM PENGUKURAN INDEKS KESEJAHTERAAN SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

- A. Pengarah : Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
- B. Ketua : Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat
- C. Wakil Ketua : Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat
- D. Sekretaris : Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Pusat
- E. Anggota :
 1. Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Pusat
 2. Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Pusat
 3. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II Kota Administrasi Jakarta Pusat
 4. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat
 5. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Pusat
 6. Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat
 7. Suku Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat
 8. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat
 9. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat
 10. Suku Badan Kepegawaian Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat
 11. Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Pusat
 12. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat
 13. Kepala Bagian Ketatalaksanaan Kepegawaian dan Pelayanan Publik Setko Administrasi Jakarta Pusat
 14. Kepala Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Kota Administrasi Jakarta Pusat

II. URAIAN TUGAS TIM

- A. Ketua :
 1. Memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan pengukuran Indeks Kesejahteraan Sosial di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat.
 2. Melakukan pemantauan jalannya pengumpulan data lintas Suku Dinas.
 3. Melaporkan hasil pelaksanaan pengukuran kepada Gubernur/Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- B. Wakil Ketua :
 1. Membantu Ketua dalam mengoordinasikan serta mengendalikan pelaksanaan pengukuran Indeks Kesejahteraan Sosial.
 2. Melakukan pemantauan teknis di lapangan.
 3. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua.
- C. Sekretaris :
 1. Mengoordinasikan administrasi pelaksanaan kegiatan pengukuran Indeks Kesejahteraan Sosial di tingkat kota.

2. Menghimpun data dan bukti dukung dari masing-masing Suku Dinas anggota.
3. Mengoordinasikan penginputan data ke dalam sistem informasi melalui sukses.kemensos.go.id
4. Menyusun laporan berkala pelaksanaan kegiatan.

D. Anggota

- :
1. Menyiapkan, menghimpun, dan mengumpulkan data serta bukti dukung yang akurat di bidang masing-masing.
 2. Menyampaikan data dan bukti dukung tersebut kepada Sekretaris Tim.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,



ARIFIN

NIP. 197206221992031003

Lampiran II : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
Nomor : e-0065 TAHUN 2026
Tanggal : 12 Oktober 2026

Dimensi	Variabel	Indikator	Nomor	Item	Sub Item	Sumber	Penanggung Jawab
Kebutuhan Dasar	Papan	Air minum layak	1	Rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak	%	BPS kab/kota atau BPS Provinsi atau BPS Nasional Screenshoot website BPS	SUDINSOS
	Kesehatan	Derajat Kesehatan	2	Prevalensi Stunting	%	Data SSGI Akan dimintakan melalui K/L OPD dapat mengumpulkan data terakhir	SUDINKES
		Akses Layanan Kesehatan	3	Rasio puskesmas terhadap jumlah penduduk	Jumlah Puskesmas	Dinas Kesehatan / Dokumen Potensi Desa Hanya puskesmas, tidak termasuk Puskesmas Pembantu	SUDINKES
	Physical Mobility	Aksesibilitas Lingkungan Fisik	4	Persentase prasarana umum yang mendukung aksesibilitas disabilitas dan lansia	Jumlah Unit Layanan Pemerintah yang memiliki prasarana umum yang mendukung aksesibilitas Lansia dan Disabilitas	Unit Layanan Pemerintah pada data Aset BPAD, contoh: 1. Gedung layanan pada pemerintahan (OPD), kecamatan, kelurahan, Mall Pelayanan Publik 2. Layanan Kesehatan (RS & Puskesmas) 3. Layanan Pendidikan (TK, SD, SMP, SMA, Kesetaraan) Contoh: Terdapat bidang miring/ jalan (Ramp), kursi khusus lansia & disabilitas, toilet disabilitas, parkir khusus disabilitas, guiding block (jalur pemandu), hand-railing (pegangan), dsb	SDCKTRP
			5		Jumlah Unit Layanan Pemerintah	data aset gedung dari BPAD	SDCKTRP
			6	Persentase prasarana umum yang mendukung aksesibilitas lansia	Jumlah Unit Layanan Pemerintah yang memiliki prasarana umum yang mendukung aksesibilitas Lansia	Unit Layanan Pemerintah pada data Aset BPAD, contoh: 1. Gedung layanan pada pemerintahan (OPD), kecamatan, kelurahan, Mall Pelayanan Publik 2. Layanan Kesehatan (RS & Puskesmas) 3. Layanan Pendidikan (TK, SD, SMP, SMA, Kesetaraan) Contoh: Terdapat bidang miring/ jalan (Ramp), kursi khusus lansia & disabilitas, toilet disabilitas, parkir khusus disabilitas, guiding block (jalur pemandu), hand-railing (pegangan), dsb	SDCKTRP

			7	Persentase prasarana umum yang mendukung aksesibilitas disabilitas	Jumlah Unit Layanan Pemerintah yang memiliki prasarana umum yang mendukung aksesibilitas disabilitas	Unit Layanan Pemerintah pada data Aset BPAD, contoh: 1. Gedung layanan pada pemerintahan (OPD), kecamatan, kelurahan, Mall Pelayanan Publik 2. Layanan Kesehatan (RS & Puskesmas) 3. Layanan Pendidikan (TK, SD, SMP, SMA, Kesetaraan) Contoh: Terdapat bidang miring/ jalan (Ramp), kursi khusus lansia & disabilitas, toilet disabilitas, parkir khusus disabilitas, guiding block (jalur pemandu), hand-railing (pegangan), dsb	SDCKTRP
		Ketersediaan Alat Bantu Mobilitas	8	Persentase sarana umum yang mendukung alat bantu mobilitas disabilitas dan lansia	Jumlah Unit Layanan Pemerintah yang telah memiliki sarana umum yang mendukung alat bantu mobilitas Lansia dan Disabilitas	Unit Layanan Pemerintah pada data Aset BPAD, contoh: 1. Layanan Kesehatan (RS & Puskesmas) 2. Sosial (panti) 3. Layanan Pendidikan (TK, SD, SMP, SMA, Kesetaraan) Contoh: memiliki kursi roda, alat bantu dengar, tongkat jalan, buku panduan dengan tulisan braille, kaki/ tangan palsu, kruk dsb	1. Layanan Kesehatan: SUDINKES 2. Layanan Sosial: SUDINSOS 3. Layanan Pendidikan: SUDISDIK
			9	Persentase sarana umum yang mendukung alat bantu mobilitas lansia	Jumlah Unit Layanan Pemerintah yang telah memiliki sarana umum yang mendukung alat bantu mobilitas Lansia	Unit Layanan Pemerintah pada data Aset BPAD, contoh: 1. Layanan Kesehatan (RS & Puskesmas) 2. Sosial (panti) 3. Layanan Pendidikan (TK, SD, SMP, SMA, Kesetaraan) Contoh: memiliki kursi roda, alat bantu dengar, tongkat jalan, buku panduan dengan tulisan braille, kaki/ tangan palsu, kruk dsb	1. Layanan Kesehatan: SUDINKES 2. Layanan Sosial: SUDINSOS 3. Layanan Pendidikan: SUDISDIK
			10	Persentase sarana umum yang mendukung alat bantu mobilitas disabilitas	Jumlah Unit Layanan Pemerintah yang telah memiliki sarana umum yang mendukung alat bantu mobilitas disabilitas	Unit Layanan Pemerintah pada data Aset BPAD, contoh: 1. Layanan Kesehatan (RS & Puskesmas) 2. Sosial (panti) 3. Layanan Pendidikan (TK, SD, SMP, SMA, Kesetaraan) Contoh: memiliki kursi roda, alat bantu dengar, tongkat jalan, buku panduan dengan tulisan braille, kaki/ tangan palsu, kruk dsb	1. Layanan Kesehatan: SUDINKES 2. Layanan Sosial: SUDINSOS 3. Layanan Pendidikan: SUDISDIK
Peranan Sosial (31%)	Partisipasi	Keikutsertaan	1	Terdapat keterwakilan Kelompok Rentan Sosial (minimal 4 kelompok rentan) dalam forum perencanaan pembangunan	Ya/Tidak (Jika "Ya" maka diisi angka 1, jika "Tidak" maka diisi angka 0)	Nota Dinas/Laporan/Berita Acara/Undangan/Foto kegiatan/Presensi Forum Perencanaan Pembangunan (Musrenbang RKPd) tingkat kota/kab Musrenbang RKPd yang dimaksud adalah Musrenbang RKPd Tahun 2026 yang dilaksanakan pada tahun 2025	SUBANPPEDA

			2	Keterwakilan masyarakat rentan sosial yang ikut dalam forum perencanaan pembangunan Musrenbang RKPD (kelompok rentan: forum anak, forum perempuan/gender, forum lansia, forum penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya)	Jumlah perwakilan masyarakat rentan sosial yang ikut dalam forum perencanaan pembangunan Musrenbang RKPD (kelompok rentan: forum anak, forum perempuan/gender, forum lansia, forum penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya)	Nota Dinas/Laporan/Berita Acara/Undangan/Foto kegiatan/Presensi Forum Perencanaan Pembangunan (Musrenbang RKPD) tingkat kota/kab Satuan: Jiwa Jika yang hadir adalah perwakilan maka tetap terhitung	SUBANPPEDA
			3	penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya)	Jumlah peserta forum perencanaan pembangunan dalam setahun (Musrenbang RKPD)	Nota Dinas/Laporan/Berita Acara/Undangan/Foto kegiatan/Presensi Forum Perencanaan Pembangunan (Musrenbang RKPD) tingkat kota/kab Satuan: Jiwa	SUBANPPEDA
			4	Terdapat keterwakilan Kelompok Disabilitas yang ikut dalam forum perencanaan pembangunan	Ya/Tidak (Jika "Ya" maka diisi angka 1, jika "Tidak" maka diisi angka 0)	Nota Dinas/Laporan/Berita Acara/Undangan/Foto kegiatan/Presensi Forum Perencanaan Pembangunan (Musrenbang RKPD) tingkat kota/kab Musrenbang RKPD yang dimaksud adalah Musrenbang RKPD Tahun 2026 yang dilaksanakan pada tahun 2025	SUBANPPEDA
			5	Keterwakilan Kelompok disabilitas dalam forum perencanaan pembangunan dalam setahun Musrenbang RKPD	Jumlah Perwakilan Penyandang Disabilitas yang ikut dalam forum perencanaan pembangunan dalam setahun Musrenbang RKPD	Nota Dinas/Laporan/Berita Acara/Undangan/Foto kegiatan/Presensi Forum Perencanaan Pembangunan (Musrenbang RKPD) tingkat kota/kab Satuan: Jiwa	SUBANPPEDA
			6	Terdapat keterwakilan Kelompok Lansia yang ikut dalam forum perencanaan pembangunan	Ya/Tidak (Jika "Ya" maka diisi angka 1, jika "Tidak" maka diisi angka 0)	Nota Dinas/Laporan/Berita Acara/Undangan/Foto kegiatan/Presensi Forum Perencanaan Pembangunan (Musrenbang RKPD) tingkat kota/kab Musrenbang RKPD yang dimaksud adalah Musrenbang RKPD Tahun 2026 yang dilaksanakan pada tahun 2025	SUBANPPEDA
			7	Keterwakilan Kelompok Lansia dalam forum perencanaan pembangunan dalam setahun Musrenbang RKPD	Jumlah Perwakilan Lansia yang ikut dalam forum perencanaan pembangunan dalam setahun Musrenbang RKPD	Nota Dinas/Laporan/Berita Acara/Undangan/Foto kegiatan/Presensi Forum Perencanaan Pembangunan (Musrenbang RKPD) tingkat kota/kab Satuan: Jiwa	SUBANPPEDA

		Keputusan	8	Terdapat Keterwakilan Kelompok Rentan Sosial (minimal 4 kelompok rentan) yang memberikan saran/ masukan dalam forum Musrenbang RKPD	Ya/Tidak (Jika "Ya" maka diisi angka 1, jika "Tidak" maka diisi angka 0)	Nota Dinas/Laporan/Berita Acara/Undangan/Foto kegiatan Forum Perencanaan Pembangunan (Musrenbang RKPD) tingkat kota/kab Musrenbang RKPD yang dimaksud adalah Musrenbang RKPD Kabupaten	SUBANPPEDA
			9	Keterwakilan masyarakat rentan sosial yang memberikan saran/ masukan dalam forum Musrenbang RKPD (kelompok rentan: forum anak, forum perempuan/ gender, forum lansia, forum penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya)	Jumlah masyarakat rentan sosial yang memberikan saran/ masukan dalam forum Musrenbang RKPD (kelompok rentan: forum anak, forum perempuan/ gender, forum lansia, forum penyandang disabilitas.	Nota Dinas/Laporan/Berita Acara/Undangan/Foto kegiatan tingkat kota/kab Satuan: Jiwa	SUBANPPEDA
			10	Terdapat keterwakilan Kelompok Disabilitas yang memberikan saran/ masukan dalam forum Perencanaan Pembangunan	Ya/Tidak (Jika "Ya" maka diisi angka 1, jika "Tidak" maka diisi angka 0)	Nota Dinas/Laporan/Berita Acara/Undangan/Foto kegiatan tingkat kota/kab Musrenbang RKPD yang dimaksud adalah Musrenbang RKPD Tahun 2026 yang dilaksanakan pada tahun 2025	SUBANPPEDA
			11	Keterwakilan Kelompok Disabilitas memberikan saran/ masukan dalam forum Musrenbang RKPD	Jumlah Penyandang Disabilitas yang memberikan saran/ masukan dalam forum Musrenbang RKPD	Nota Dinas/Laporan/Berita Acara/Undangan/Foto kegiatan tingkat kota/kab Satuan: Jiwa	SUBANPPEDA
			12	Terdapat Keterwakilan Kelompok Lansia yang memberikan saran/ masukan dalam forum Perencanaan Pembangunan	Ya/Tidak (Jika "Ya" maka diisi angka 1, jika "Tidak" maka diisi angka 0)	Nota Dinas/Laporan/Berita Acara/Undangan/Foto kegiatan tingkat kota/kab Musrenbang RKPD yang dimaksud adalah Musrenbang RKPD Tahun 2026 yang dilaksanakan pada tahun 2025	SUBANPPEDA
			13	Keterwakilan Kelompok Lansia yang memberikan saran/ masukan dalam forum Musrenbang RKPD	Jumlah perwakilan kelompok Lansia yang memberikan saran/ masukan dalam forum Musrenbang RKPD	Nota Dinas/Laporan/Berita Acara/Undangan/Foto kegiatan tingkat kota/kab Satuan: Jiwa	SUBANPPEDA
	Kohesi Sosial	Relasi Sosial	14	% masyarakat rentan sosial yang tergabung dalam organisasi masyarakat	Jumlah masyarakat rentan (Lansia, Penyandang Disabilitas, dan Perempuan) yang tergabung dalam organisasi masyarakat	Laporan Anggota Kelompok Rentan	SUDINSOS

			15		Jumlah masyarakat rentan (Lansia, Penyandang Disabilitas, dan Perempuan)	Laporan Data PPKS	SUDINSOS
			16	% disabilitas yang tergabung dalam organisasi masyarakat	Jumlah Disabilitas yang tergabung organisasi masyarakat / komunitas disabilitas	Laporan Disabilitas Yang Tergabung Pada Ormas/ Komunitas Masuk dalam komunitas/organisasi di tingkat kota/kab	SUDINSOS
			17	% Lansia yang tergabung dalam organisasi masyarakat	Jumlah Lansia yang tergabung dalam organisasi masyarakat/ komunitas Lansia	Laporan Lansia Yang Tergabung Pada Ormas/ Komunitas Masuk dalam komunitas/organisasi di tingkat kota/kab	SUDINSOS
			18	% Masyarakat dengan status rentan sosial (Lansia, Anak, Gelandangan/ Pengemis, penyandang disabilitas) terlanter yang memperoleh Rehabilitasi Sosial	Jumlah masyarakat dengan status rentan sosial (seperti Lansia, Anak, Gelandangan, Penyandang Disabilitas) Terlanter yang memperoleh Rehabilitasi Sosial di luar Panti	Laporan Data SPM ULS/LBK/Penjangkauan/TAS	SUDINSOS
			19		Jumlah masyarakat dengan status rentan sosial (seperti Lansia, Anak, Gelandangan, Penyandang Disabilitas) Terlanter	Laporan Jumlah PPKS	SUDINSOS
			20	Persentase Masyarakat Penyandang Disabilitas Terlanter yang memperoleh Rehabilitasi Sosial diluar Panti	Jumlah Masyarakat Penyandang Disabilitas Terlanter yang memperoleh Rehabilitasi Sosial diluar Panti	Laporan Data SPM ULS/LBK/Penjangkauan/TAS	SUDINSOS
			21		Jumlah Disabilitas Terlanter	Laporan Jumlah PPKS	SUDINSOS
			22	Persentase Masyarakat Lanjut Usia Terlanter yang memperoleh Rehabilitasi Sosial diluar Panti	Jumlah Masyarakat Lanjut Usia Terlanter yang memperoleh Rehabilitasi Sosial diluar Panti	Laporan Data SPM ULS/LBK/Penjangkauan/TAS	SUDINSOS
			23		Jumlah Lansia Terlanter	Laporan Jumlah PPKS	SUDINSOS
			24	% masyarakat rentan sosial yang menempati jabatan strategis di lembaga eksekutif	Jumlah masyarakat rentan sosial yang menempati jabatan strategis di lembaga eksekutif	Laporan PPKS yang Tergabung Pada Jabatan Strategis pada Lembaga Eksekutif/ Struktural Maksimal Eselon 2 & 3 tingkat kota/kab	SUBAN KEPEGAWAIAN
			25		Total Jabatan Strategis di Lembaga Eksekutif	Total Jabatan Strategis Di Lembaga Eksekutif (Maksimal Eselon 2 & 3) tingkat kota/kab	SUBAN KEPEGAWAIAN

			26	% sekolah non SLB yang menerapkan kebijakan pendidikan inklusi	Jumlah sekolah non-SLB yang menerapkan kebijakan pendidikan inklusi	Hasil pendataan tingkat kota/kab Syarat wajib sekolah inklusi: memiliki guru pembimbing khusus (Permendikbud 70 2009)	SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH
			27		Jumlah sekolah non-SLB	Laporan Data Pendidikan tingkat kota/kab	SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH
			28	% siswa disabilitas yang bersekolah di sekolah non-SLB	Jumlah siswa Disabilitas yang bersekolah di sekolah non-SLB	Laporan Data Pendidikan tingkat kota/kab	SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH
			29		Jumlah penduduk Disabilitas usia sekolah (7-15 tahun)	Laporan Data Pendidikan tingkat kota/kab Usia sekolah SD-SMA Swasta & Negeri	SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH
			30	% Penyandang Disabilitas yang menempati jabatan strategis di lembaga eksekutif	Jumlah Penyandang Disabilitas yang menempati jabatan strategis di lembaga eksekutif	Laporan Disabilitas Yang Terhubung Pada Jabatan Strategis pada Lembaga Eksekutif/Struktural Maksimal Eselon 2 & 3 tingkat kota/kab	SUBAN KEPEGAWAIAN
		Kualitas Hidup	31	% masyarakat yang mengakses layanan polijiwa/pskiater (depresi, stress, kecemasan)	Jumlah pasien yang mengakses layanan polijiwa di fakses pemerintah	Rekapitulasi Data Pasien Dari Dinkes Yang Bersumber Dari Rumah Sakit & Puskesmas Yang Mengakses Klinik Jiwa / Psikiater tingkat kota/kab	SUDINKES
			32	Terdapat Kebijakan (Perda) tentang Lansia	Ya/Tidak (Jika "Ya" maka diisi angka 1, jika "Tidak" maka diisi angka 0)	Data Perda Tentang Lansia Dari Bagian Hukum	SUDINSOS
		Kebijakan inklusif	33	Terdapat Kebijakan (Perda) tentang Disabilitas	Ya/Tidak (Jika "Ya" maka diisi angka 1, jika "Tidak" maka diisi angka 0)	Data Perda Tentang Disabilitas Dari Bagian Hukum	SUDINSOS

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,



ARIFIN
NIP. 197206221992031003